

PENYELENGGARAAN KEPENYULUHAN KEAGAMAAN PADA MASYARAKAT KOTA PARE-PARE

Implementation of Religion Guiding on communities in Pare-Pare city

Oleh: **Abd. Shadiq Kawu ***

*Peneliti pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Kantor: Jl. A.P. Pettarani No. 72 Makassar

E-mail: shadiq_kawuS@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran para penyuluh agama dalam membantu pembangunan keagamaan masyarakat, dan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mendorong dan menghambat peran serta fungsi penyuluh agama dalam melaksanakan program pelayanan keagamaan pada masyarakat. Memanfaatkan paradigma dan metode penelitian kualitatif, melalui proses pencarian dan penggalian data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam dan observasi, ditemukan fakta bahwa banyak masyarakat yang tidak mengetahui akan keberadaan penyuluh agama, namun partisipasi masyarakat dalam kegiatan kepenyuluhan tetaplah ada baik secara langsung maupun tak langsung, yaitu dengan membentuk atau mengaktifkan majelis taklim, kelompok pengajian, TK/TPA di lingkungan maupun di komunitas mereka. Masyarakat mengharapkan seorang penyuluh harus mampu menjadi seorang konselor yang handal seputar keagamaan bagi masyarakat.

Kata Kunci: Penyuluh, konselor agama, kelompok dampingan

Abstract

This research aims to describe the role of religious counselors in assisting the development of religious faith communities, and to describe the factors that encourage and inhibit the role and functions of religious educators in implementing programs on public religious services. Take advantage paradigm and qualitative research methods, through the process of finding and extracting data is done through in-depth interviews and observation techniques, found that many people are unaware of the existence of religious educators, but community participation in activities there remains kepenyuluhan either directly or indirectly, ie to establish or activate taklim assemblies, study groups, TK/ TPA in the environment and in their communities- Society expects a counselor should be able to become a reliable counselor about the religious community.

Keywords: Extension, religious counselors, the group assisted

PENDAHULUAN

Kegiatan kepenyuluhan merupakan salah satu bentuk pelayanan keagamaan pada masyarakat adalah upaya untuk menerjemahkan kualitas pemahaman dan pengamalan agama bagi masyarakat melalui upaya pengembangan wawasan keagamaan, dan pengembangan pusat-pusat kajian masyarakat melalui pembentukan kelompok-kelompok dampingan. Dalam konteks internal Kementerian Agama, kehadiran penyuluh agama dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi umat beragama. Institusionalisasi penyuluh agama

sebagai salah satu jabatan fungsional dalam lingkungan kerja Kementerian Agama Republik Indonesia diharapkan dapat menjadi wadah sistematisasi serta memperlancar tugas-tugas kepenyuluhan agama sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat.

Sebagaimana daerah lainnya, di Kota Pare-Pare, penyuluhan agama telah berjalan sebagai bentuk pelayanan keagamaan kepada masyarakat. Dalam implementasinya diatur sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kebutuhan warga masyarakat, meski dalam perjalanannya proses pelaksanaan penyuluhan agama masih menuai masalah dan kendala sebagai bentuk proses realisasi konsep kepenyuluhan agama guna

meningkatkan pemahaman, pennghayatan, dan pengamalan agama warga masyarakat di kota parepare. Untuk itu deskripsi dan analisis mengenai pelaksanaan kegiatan kepenyuluhan agama sebagai bentuk pelayanan agama kepada masyarakat di Kota Pare-Pare, kiranya menjadi cukup penting untuk dilakukan.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, sebagai berikut: 1) sejauh mana penyelenggaraan kepenyuluhan dapat berfungsi dalam membantu pembangunan keagamaan masyarakat; 2) faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat peran dan fungsi penyuluh agama melaksanakan program pelayanan keagamaan pada masyarakat; 3) bagaimana respon masyarakat terhadap penyelenggaraan kepenyuluhan agama?

Dalam Himpunan Peraturan Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya padapasal 1 disebutkan : "Penyuluhan Agama adalah suatu kegiatan bimbingan atau penyuluhan Agama dan pembangunan melalui bahasa agama untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional"¹. Sedangkan menurut M. Arifin, yang dimaksud dengan penyuluhan agama adalah : "Segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya agar supaya orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa"².

Berdasarkan Keputusan Menko Wasbang PAN Nomor: 54/Kep/MK.WASPAN/9/1999, tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya, Penyuluh Agama adalah : "Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama".

Hasil penelitian Balai Litbang Agama tahun 200" tentang pelayanan keagamaan Departemen Agama menunjukkan masih lemahnya tingkat keterlibatar Departemen Agama dalam melayani kebutuhan keagamaan masyarakat. Pada prinsipnya, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa program pelayanan Departemen Agama dirasakan sangat minim yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Minim; program pelayanan Departemen Agama disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: *pertama*, mekanisme penyusunan anggaran yang tidak berangkat dan kebutuhan riil. *Kedua*, pola rekrutmen pegawai negeri baru ataupun mutasi jabatan tidak memperhatikan aspek kelayakan. *Ketiga*, sumber daya manusia yang lemah dan malas. Lemahnya SDM disebabkan oleh kurangnya program pembangunan kapasitas melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukan kepada pegawai *Keempat*, model kepemimpinan yang birokratis dan hirarkis. *Kelima*, suasana kerja tidak kondusif yang disebabkan oleh sarana dan prasarana yang kurang, mendukung. *Keenam*, terjadinya *overlapping job* antara Kanwil dan Kandepag³.

Dengan problem pelayanan yang kurang maksimal, penelitian tentang penyelenggaraan kepenyuluhan ini berupaya untuk melengkapi penelitian sebelumnya dengan sasaran yang lebih spesifik yaitu penyuluh agama. Penelitian tentang penyuluh menjadi penting dilakukan terutama untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap dakwah sebagaimana yang dilansir oleh penelitian tentang dakwah keagamaan di daerah tertinggal.

HASIL PENELITIAN

Penyelenggaraan Kepenyuluhan Agama di Kota Pare-Pare

Ada tiga model dalam sistem rekrutmen penyuluh dalam lingkungan kerja Kantor Kementerian Agama Kota Pare-Pare, yaitu rekrutmen melalui seleksi umum tes CPNS, pengangkatan PNS dari tenaga penyuluh honorer, serta metode *inpassing*.

¹ Biro Kepegavaian Sekretariat Jenderal Depag RI. 2003. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya (tidak diterbitkan)*

² Mudzhar, Atho. 2009. *Pengembangan Jaringan Riset dalam Rangka Penguatan Peran Agama dalam Pembangunan Nasional* Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI

³ Arifin. M 1999. *Strategi dan Sinergi Kepenyuluhan Agama*. Jakarta: Intermedia.

Pengangkatan penyuluh PNS dari tenaga penyuluh honorer dilakukan dengan melihat masa kerja penyuluh yang bersangkutan dengan minimal masa ^akti selama 5 tahun. Metode *inpassing* sebagai ~ietode rekrutmen tenaga fungsional penyuluh, yaitu rengalihan tugas PNS yang ada dalam lingkungan sementarian Agama Kota Pare-pare dari struktural menjadi fungsional penyuluh. Model *inpassing* ini dilakukan karena beberapa alasan, yaitu untuk menutupi kekurangan jumlah penyuluh PNS yang masih sangat minim serta ditujukan untuk memberikan kesempatan kenaikan pangkat bagi pegawai-pegawai •:: uktrual yang jenjang ke pangkatannya telah *mandeg* pada golongan III/d, sehingga dengan dialihkan Tienjadi pejabat fungsional penyuluh diharapkan enjang ke pangkatan PNS yang bersangkutan dapat mencapai golongan IV.

Sedangkan sistem rekrutmen untuk tenaga penyuluh honorer dilakukan dengan mekanisme pendataan terhadap tenaga *muballigh*, pembina majelis taklim atau kelompok pengajian masyarakat, serta pembina atau guru di TK/TPA atau madrasah diniyah yang ada di kota Pare-Pare. Calon tenaga penyuluh honorer yang akan direkrut harus memenuhi persyaratan dengan jenjang pendidikan minimal SLTA serta memiliki objek penyuluhan/binaan minimal 1 kelompok binaan baik berupa majelis taklim, pengajian masyarakat/komunitas/instansi, lembaga pendidikan agama Islam non formal berupa TK/TPA atau madrasah diniyah. Kemudian calon tenaga penyuluh honorer mengajukan usulan ke Kantor Kementerian Agama Kota Pare-Pare, lalu Kementerian Agama melalui pihak Kasi Penamas (Penerangan Masyarakat) melakukan pemantauan terhadap kelompok masyarakat yang menjadi objek penyuluhan dari calon penyuluh yang bersangkutan. Setelah dianggap layak, kemudian ditindaklanjuti dan diangkat sebagai tenaga penyuluh honorer untuk jangka 1 tahun melalui SK yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Wilayah Sulawesi Selatan.

Jumlah Tenaga Penyuluh PNS/Honorer di Kota Pare-Pare

Jumlah penyuluh PNS yang ada di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pare-pare

berjumlah 20 orang, yang terdiri atas penyuluh agama Islam sebanyak 18 orang, penyuluh agama Kristen Protestan sebanyak 1 orang, dan penyuluh agama Buddha sebanyak 1 orang. Dari 18 penyuluh agama Islam, 2 orang diantaranya menjadi penyuluh melalui mekanisme seleksi umum CPNS, 8 orang diangkat dari penyuluh honorer, serta 8 orang beralih dari pegawai struktural menjadi fungsional penyuluh atau *inpassing*’.

Agregat 18 penyuluh Agama Islam PNS 12 orang diantaranya adalah perempuan dan 6 orang lainnya laki-laki. Dari jenjang pendidikan, 2 orang sarjana muda, 15 orang sarjana, dan 1 orang atas nama Iriyani Ambar berstatus Magister dan sementara menempuh pendidikan Doktor. Latar belakang pendidikan, 17 Orang berlatar belakang perguruan tinggi agama dan 1 orang atas nama Hasyim Usman berlatar belakang sarjana kehutanan. Hasyim Usman terangkat sebagai tenaga penyuluh PNS melalui mekanisme penyuluh honorer. Meski berlatar belakang sarjana kehutanan, tapi beliau adalah seorang *qari*’ dan *muballigh* yang intensif melakukan kerja-kerja dakwah dan pembinaan agama, hingga karena alasan itulah yang bersangkutan diterima sebagai tenaga penyuluh honorer dan kemudian terangkat sebagai PNS fungsional penyuluh.

Berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Wilayah Sulawesi Selatan, jumlah tenaga penyuluh honorer untuk kota Pare-pare berjumlah 100 orang. Namun, dalam perjalanannya selama tahun 2010, 3 orang diantaranya terangkat sebagai penyuluh PNS, yaitu Muhammad, S. Ag, Asman, S. Ag, dan Ami Majid, S. HI Dengan demikian jumlah tenaga penyuluh honorer yang tersisa untuk tahun 2010 adalah berjumlah 97 orang.

Dari 97 orang tenaga penyuluh honorer yang ada di Pare-Pare kesemuanya adalah penyuluh agama Islam, dengan perbandingan 49 penyuluh laki-laki dan 48 lainnya perempuan. Adapun kualifikasi pendidikan, 13 orang pendidikan Sarjana muda/Diploma, 52 orang berkualifikasi pendidikan S1, dan sisanya sejumlah 32 orang berlatar belakang pendidikan SLTA. Mengenai latar belakang pendidikan tenaga penyuluh honorer, baik yang Sarjana muda/Diploma maupun SI,

’ BPS Kota Pare-pare. *Pare-pare dalam Angka 2010*

umumnya adalah berlatar belakang pendidikan/ perguruan tinggi agama.

Sistem Pelaksanaan Kegiatan Kepenyuluhan

Pelaksanaan kegiatan kepenyuluhan di Pare-Pare sebagaimana aturannya diawali dengan penyusunan program kerja untuk objek binaan sesuai dengan kebutuhan masing-masing warga binaan. Program kerja ini kemudian menjadi acuan dalam proses pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Kegiatan penyuluhan serta program kerja tersebut dilaporkan dilakukan evaluasi oleh Kantor Kementerian Agama Kota Pare-pare.

Masing-masing tenaga penyuluh baik yang PNS maupun honorer bertanggung jawab pada setiap kelompok masyarakat yang menjadi objek penyuluhan mereka. Tenaga penyuluh PNS bertanggung jawab untuk membina 5 sampai 6 kelompok binaan sesuai dengan jenjang kepangkatan mereka. Sedangkan untuk tenaga penyuluh honorer, masing-masing bertanggung jawab pada minimal 1 kelompok yang menjadi objek penyuluhan mereka. Kelompok masyarakat yang kemudian menjadi objek penyuluhan ini terbentuk baik atas inisiatif dari penyuluh yang kemudian mengumpulkan warga dalam suatu wadah. Juga terbentuk atas inisiatif warga masyarakat sendiri yang kemudian membentuk kelompok-kelompok pengajian atau majelis taklim yang kemudian datang penyuluh untuk menjadikan mereka sebagai objek penyuluhan mereka.

'Kelompok yang menjadi objek penyuluhan cukup variatif, berkisar antara majelis taklim baik dari masyarakat umum, lembaga, maupun ormas, kelompok pengajian baik kelompok masyarakat umum, instansi, ataupun komunitas tertentu, juga pada kelompok pengajian yang merupakan jamaah mesjid atau jamaah di suatu lingkungan pesantren, selain itu juga pada kelompok pengajian TK/TPA ataupun madrasah diniyah.

Dengan demikian warga masyarakat yang menjadi objek penyuluhan cukup variatif, baik dari segi usia, lingkungan, maupun kelompok. Mulai dari usia anak-anak pada TK/TPA dan madrasah diniyah, juga pada lingkungan tempat tinggal yang berbeda-beda, serta kelompok masyarakat mulai dari ibu-ibu, bapak-bapak, remaja, jamaah mesjid, karyawan, komunitas wiraswasta, hingga kelompok *muallaf*, dan kelompok wanita khusus.

Masing-masing penyuluh membuat program kerja sebagai acuan dalam membina objek penyuluhannya. Kegiatan program kerja yang dilakukan berupa pembinaan rutin jamaah, seperti pengajian berupa ceramah maupun diskusi keislaman, pengajaran baca-tulis Alquran, dan praktek ibadah. Selain itu juga berupa kegiatan lain yang menunjang kegiatan kepenyuluhan seperti kegiatan zikir bersama, pembacaan surah Yasin, hingga kegiatan-kegiatan konsultasi seputar masalah agama. Adapun materi-materi yang umum disampaikan dalam kegiatan kepenyuluhan adalah materi seputar akidah, baca-tulis Alquran, praktek ibadah shalat, materi-materi seputar fiqh, akhlak, pembinaan keluarga sakinah, penyelenggaraan jenazah, doa-doa, dan lain-lain.

Analisis atas Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kebutuhan Masyarakat

Berdasarkan temuan mengenai mekanisme rekrutmen tenaga penyuluh baik PNS maupun honorer serta penyelenggaraan kepenyuluhan agama Islam di Kota Pare-pare, ada beberapa catatan yang dapat peneliti berikan sebagai hasil analisis dari data yang ditemukan di lokasi penelitian.

Mekanisme rekrutmen penyuluh PNS melalui seleksi umum CPNS masih sangat kurang dalam menunjang ketersediaan tenaga fungsional penyuluh. Demikian pula dalam rekrutmen penyuluh PNS dari tenaga honorer, sehingga jumlah tenaga penyuluh PNS di lingkungan Kementerian Agama Kota Pare-pare masih sangat minim dan harus ditambah dengan rekrutmen penyuluh melalui mekanisme *inpassing*.

Mekanisme *inpassing* sebagai rekrutmen tenaga fungsional penyuluh pun sangat rentan menyisakan problema jika hanya sekedar ditujukan untuk penyelamatan kepangkatan PNS struktural yang jenjang kepangkatannya telah *mandeg* pada golongan III/d. Sehingga hal ini tentu saja sangat mempengaruhi maksimalisasi penyelenggaraan kepenyuluhan dalam mencapai target yang diharapkan. Kalau pun tetap harus dilakukan mekanisme *inpassing*, perlu diperhatikan dengan seksama, bahwa hal tersebut dilakukan memang dengan tujuan untuk menambah kuantitas tenaga penyuluh fungsional sehingga dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepenyuluhan yang dilakukan sebagai bentuk pelayanan keagamaan kepada masyarakat. Jika mekanisme *inpassing* dilakukan harus dibarengi dengan pembekalan yang cukup kepada PNS struktural yang hendak beralih

menjadi PNS fungsional penyuluh. Sehingga mekanisme *inpassing* tidak terkesan hanya berorientasi pragmatis semata guna menyelamatkan PNS struktural yang jenjang kepangkatannya telah maksimal pada jenjang III/d dan untuk bisa sampai pada golongan IV.

Berdasarkan temuan yang peneliti dapatkan dan ditambah dengan wawancara dengan Iriyani Ambar mengenai penyelenggaraan kepenyuluhan. Secara umum penyelenggaraan kepenyuluhan agama Islam di Kota Pare-Pare telah berjalan dengan cukup baik serta memperlihatkan pengaruh yang cukup baik dalam hal peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama pada warga masyarakat yang tergabung dalam kelompok yang menjadi objek penyuluhan.

Tidak sedikit warga masyarakat yang sebelumnya memiliki pengetahuan yang sangat minim seputar ajaran agama serta kurang dalam pengamalannya, dengan kehadiran tenaga penyuluh baik PNS maupun honorer yang cukup intensif melakukan pembinaan, pengetahuan dan pengamalan ajaran agama, khususnya seputar praktek-praktek ibadah. Penyelenggaraan kepenyuluhan juga cukup memberikan kontribusi dalam hal peningkatan kemampuan baca-tulis Alquran, bukan hanya pada anak-anak tapi juga pada masyarakat muslim yang berusia dewasa yang sebelumnya belum mampu dalam hal baca-tulis Alquran dengan baik.

Meskipun demikian, secara umum penyelenggaraan kepenyuluhan sebagai bentuk pelayanan keagamaan untuk umat Islam di Kota Pare-Pare masih belum maksimal dalam menyentuh semua lapisan masyarakat dari berbagai kalangan. Hal ini dimungkinkan terjadi karena minimnya tenaga fungsional penyuluh PNS yang terdistribusi pada 4 KUA yang ada serta kesibukan para penyuluh honorer sehingga tidak dapat secara maksimal memperluas atau menambah wilayah/objek penyuluhannya.

Dalam hal lapisan/kelompok masyarakat yang menjadi objek penyuluhan, penyelenggaraan kepenyuluhan Agama Islam yang dilakukan di jajaran Kementerian Agama Kota Pare-Pare cukup memperlihatkan perkembangan yang baik. Hal ini didasarkan pada temuan bahwa tidak semua objek penyuluhan adalah melalui majelis taklim atau TK/TPA saja, tapi penyelenggaraan kepenyuluhan juga sudah menyentuh pada kelompok-kelompok masyarakat di instansi perkantoran dan perusahaan, dan juga pada kelompok *muallaf* dan kaum marginal.

Mengenai materi-materi keagamaan yang disampaikan dalam kegiatan kepenyuluhan yang dilakukan, peneliti melihat sudah cukup mencakup materi-materi dasar keislaman dalam hal pemahaman dan praktek dasar seputar akidah, ibadah, baca-tulis Alquran, materi-materi seputar fiqh, dan pembinaan akhlak. Hanya saja *content* dari materi-materi tersebut perlu dikembangkan lebih lanjut dalam rangka menanamkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam kepada masyarakat tentang ajaran Islam.

Demikian pula dalam metode penyampaian materi, masih perlu dilakukan pengembangan dan inovasi dalam hal metodologi dakwah agar materi-materi keislaman yang hendak diajarkan dapat tersampaikan dengan baik. Sehingga masyarakat lebih mudah dalam memahami, menghayati, serta mengamalkan pada praktek dalam kehidupan sehari-hari.

Mengenai insentif yang diberikan kepada tenaga penyuluh honorer sebesar Rp. 100.000 per bulannya yang diterima setiap 4 bulan sekali, sebagaimana yang diakui oleh penyuluh honorer yang peneliti wawancarai masih sangat jauh dari kelayakan. Dengan jumlah nominal Rp. 400.000 untuk menunjang kegiatan kepenyuluhan selama 4 bulan, tentu saja sangat minim apalagi untuk memberikan kesejahteraan kepada penyuluh honorer. Untuk itu, peningkatan jumlah insentif yang diberikan kepada penyuluh honorer sudah seyakinya dilakukan, agar kerja kepenyuluhan yang mereka lakukan dapat berjalan secara maksimal sebagaimana yang diharapkan.

Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Faktor Pendukung

a. Wilayah kerja yang relatif kecil dan mudah dijangkau

Wilayah kota Pare-Pare ada wilayah kota yang luasnya hanya sekitar 99 Km², sehingga untuk menjangkau keseluruhan wilayah Kota Pare-Pare, tentu saja sangatlah mudah dan hanya membutuhkan waktu yang relatif singkat. Kemudahan ini juga semakin ditunjang dengan akses jalan yang sangat memadai pada seluruh wilayah kota Pare-Pare yang merupakan wilayah kerja penyuluhan. Hal ini tentu saja sangat mendukung kerja-kerja kepenyuluhan, dalam hal mobilitas penyuluh dalam melaksanakan tugas-tugas kepenyuluhannya.

b. Semangat dan antusiasme dakwah para penyuluh

Sebagaimana diakui oleh salah seorang informan, faktor utama yang mendorong masih berlangsungnya kegiatan kepenyuluhan adalah masih mengakarnya semangat berdakwah dan pengabdian penyuluh agama PNS dan penyuluh honorer kepada masyarakat. Padahal, dari segi ekonomi, jumlah tunjangan (PNS) dan honor (honorer) tidak sebanding dengan volume kerja mereka.

Faktor Penghambat

a. Tidak adanya Kelompok Kerja Penyuluh (Pokjaluh)

Untuk penyuluh agama yang berada dalam lingkungan kerja Kantor Kementerian Agama Kota Pare-Pare belum memiliki Pokjaluh (Kelompok Kerja Penyuluh). Ketiadaan Pokjaluh ini membuat antar penyuluh kurang terjadi koordinasi, kerjasama, *sharing*, dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun pengembangan program kepenyuluhan yang mereka lakukan. Dan penyuluh pun lebih terlihat bekerja sendiri-sendiri berdasarkan kreatifitas mereka masing-masing.

b. Minimnya program pengembangan kapasitas penyuluh

Satu hal yang sangat dikeluhkan oleh para penyuluh adalah minimnya program pengembangan kapasitas penyuluh berupa diklat keterampilan penyuluh, *workshop* maupun kegiatan-kegiatan lain yang berorientasi mengembangkan potensi dan kapasitas penyuluh, seperti lomba karya tulis ilmiah antar penyuluh, dan lain-lain. Hal ini tentu saja membuat stagnasi penyuluh pada wilayah pengembangan kreatifitas, *skill*, metode penyuluh, dan segala hal yang berkenaan dengan efektifitas dan peningkatan kualitas penyelenggaraan kepenyuluhan.

c. Ketiadaan biaya operasional dan minimnya insentif

Ketiadaan biaya operasional dalam melaksanakan kerja-kerja kepenyuluhan, seperti biaya transportasi maupun pembelian media pembelajaran dalam penyelenggaraan kepenyuluhan sangat menghambat efektivitas dan kualitas kerja kepenyuluhan yang dilakukan. Demikian pulamengenai insentif penyuluh honorer yang sangat minim-sebesar Rp. 100.000/bulan dan diterima tiap 4 bulan. Hal ini tentu saja sangat tidak menunjang terlaksananya penyelenggaraan kepenyuluhan secara maksimal.

Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Kepenyuluhan

Secara umum, rata-rata warga masyarakat yang peneliti temui tidak tahu akan keberadaan penyuluh sebagai tenaga profesional yang ditugaskan oleh Kementerian Agama guna memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat. Umumnya mereka hanya mengetahui tentang muballigh atau ustadz dan guru mengaji/guru TK/TPA yang bertugas membimbing bimbingan keagamaan kepada masyarakat tanpa mereka tahu bahwa *muballigh* atau guru TK/TPA tersebut adalah juga seorang penyuluh.

Namun demikian, tidak bisa dikatakan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kepenyuluhan sama sekali tidak ada. Secara langsung maupun tak langsung masyarakat membantu kegiatan kepenyuluhan dengan turut membentuk atau mengaktifkan majelis taklim, kelompok pengajian, maupun TK/TPA yang ada dalam lingkungan mereka.

Konsep Ideal Penyelenggaraan Kepenyuluhan Menurut Masyarakat

Beberapa warga masyarakat kota Pare-pare yang peneliti temui memberikan beberapa ekspektasinya terhadap penyuluh agama dan penyelenggaraan kepenyuluhan agama. Penyuluh selain bertugas sebagai pembimbing keagamaan bagi warga masyarakat juga mesti bertugas sebagai konselor yang selalu siap mendengarkan dan memberikan solusi atas permasalahan masyarakat yang berhubungan dengan keagamaan. Untuk itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Basuki Busrah, MM -PNS dalam lingkungan Pemkot Pare-Pare, seorang penyuluh agama harus memiliki kecakapan sebagai seorang konselor yang handal dan bukan hanya fasih sebagai seorang penceramah. Selain itu seorang penyuluh juga mesti terampil dalam menerapkan metode pembelajaran yang humanis dan efektif dalam proses transformasi wacana dan ajaran agama kepada masyarakat.

M. Nawawi Markarama, seorang fungsionaris ormas Islam yang ada di Pare-pare mengatakan, bahwa seorang penyuluh mesti hadir sebagai seorang pencerah yang tidak hanya memberikan pengajaran dan bimbingan seputar aspek doktrinal agama, tapi lebih dari itu, seorang penyuluh mesti berperan aktif dalam meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat dengan pendekatan yang lebih intelektual dan tidak melulu bersifat doktrinal.

PENUTUP

Kesimpulan

Saat ini Kementerian Agama Kota Pare-Pare memiliki 18 penyuluh Agama Islam berstatus PNS yang direkrut dengan tiga mekanisme rekrutmen PNS penyuluh di lingkungan Kementerian Agama Kota Pare-pare, yaitu; melalui mekanisme seleksi umum CPNS, *data base* penyuluh honorer, dan *inpassing*. Untuk penyuluh honorer berjumlah 97 orang dengan mekanisme rekrutmen kontrak yang diperbaharui setiap tahun dan ditetapkan melalui SK yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulsel.

Setiap penyuluh mendampingi 5-6 (untuk PNS) dan 1 objek penyuluhan (untuk honorer). Setiap penyuluh membuat program kerja untuk setiap objek penyuluhan dan nantinya akan dilaporkan setiap pekan (untuk PNS) dan setiap 4 bulan (untuk honorer). Penyuluh di Kota Pare-pare menjadikan majelis taklim, TK.TPA, pengajian umum/masyarakat atau kelompok pengajian komunitas atau instansi tertentu sebagai objek penyuluhan mereka dengan materi-materi yang diajarkan seputar akidah, ibadah, bacatulis Alquran, doa-doa, akhlak, penyelenggaraan jenazah. Kegiatan kepenyuluhan dilaksanakan dengan metode ceramah monolog, diskusi, praktek, zikir bersama, dan lain-lain.

Kondisi kota Pare-Pare yang relatif kecil dengan akses transportasi yang memadai serta antusiasme dan semangat dakwah yang tinggi dari kalangan penyuluh merupakan faktor pendukung penyelenggaraan kepenyuluhan di Kota Pare-pare. Sementara faktor penghambatnya adalah tidak adanya Kelompok Kerja Penyuluh (Pokjaluh), minimnya program pengembangan dan peningkatan kapasitas penyuluh, serta tidak adanya biaya operasional dan minimnya insentif penyuluh honorer.

Secara umum banyak masyarakat yang tidak mengetahui akan keberadaan penyuluh agama, namun partisipasi masyarakat dalam kegiatan kepenyuluhan tetaplah ada baik secara langsung maupun tak langsung, yaitu dengan membentuk atau mengaktifkan majelis taklim, kelompok pengajian, TK/TPA di lingkungan maupun di komunitas mereka.

Masyarakat mengharapkan seorang penyuluh harus mampu menjadi seorang konselor yang handal seputar keagamaan bagi masyarakat. Kegiatan kepenyuluhan juga diharapkan berfungsi sebagai media pencerahan bagi masyarakat. dan seorang penyuluh tidak melulu mengajarkan agama dari aspek doktrinal melainkan juga bersifat intelektual. Metode pengajaran

yang efektif dan humanis serta diarahkan untuk menangkal dan/atau mengurangi laju budaya hedonisme, konsumerisme, demoralisasi, dan sekularisme yang mulai merasuk pada masyarakat Pare-pare sebagai masyarakat urban.

Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian, ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi penelitian ini: 1) mekanisme *inpassing* mesti memperhatikan kualifikasi dan kompetensi sehingga mekanisme *inpassing* tidak terkesan aspek pragmatismenya saja, yaitu untuk penyelamatan kepangkatan PNS struktural; 2) perlu diadakan penerimaan PNS fungsional penyuluh, baik melalui seleksi CPNS maupun *data base* honorer guna menambah tenaga penyuluh yang ada; 3) membentuk Kelompok Kerja Penyuluh (Pokjaluh) untuk mengefektifkan dan mengkoordinasikan kerja-kerja penyuluh pada Kantor Kementerian Agama Kota Pare-pare; 4) memperbanyak program-program yang berorientasi pada peningkatan dan pengembangan kualitas dan kapasitas penyuluh, seperti diklat keterampilan penyuluh.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih pada kolega, pengelola jurnal Al-Qalam atas dimuatnya artikel ini. Apresiasi yang sama juga saya sampaikan kepada para informan, aparat Kementerian Agama Kota Pare-Pare dan sumber-sumber informasi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin. M. 1999. *Strategi dan Sinergi Kepenyuluhan Agama*. Jakarta: Intermedia.
- Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Depag RI. 2003. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya (tidak diterbitkan)*.
- BPS Kota Pare-pare. *Pare-pare dalam Angka 2010*
- Effendi, Bachtiar. 2000. *Islam dan Negara*. Jakarta: Paramadina.
- Mudzhar. Atho. 2009. *Pengembangan Jaringan Riset dalam Rangka Penguatan Peran Agama dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- Tim Peneliti Balai Litbang Agama Makassar. 2008. *Optimalisasi Pelayanan Keagamaan Departemen Agama*. Makassar: Balai Litbang Agama.